

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
<i>Routing Slip</i>	vi
Catatan Hasil Review (CHR) Kantor Daerah	vii-viii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	ix-x
I Laporan Realisasi Anggaran	xi
II Neraca	xii
III Laporan Operasional.....	xiii
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	xiv
V Catatan atas Laporan Keuangan	1-35
A Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPMSPH	1-3
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.3. Basis Akutansi	3-4
A.4. Dasar Pengukuran	4
A.5. Kebijakan Akutansi	4
(1) Pendapatan –LRA.....	5
(2) Pendapatan- LO.....	5
(3) Belanja.....	5-6
(4) Beban	6
(5) Aset.....	6
a. Aset Lancar	6-7
b. Aset Tetap	7-8
c. Penyusutan Aset Tetap.....	8-9
d. Piutang Jangka Panjang.....	9
e. Aset Lainnya.....	9-10
(6) Kewajiban	10-11
(7) Ekuitas	11
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	12
B.1 Pendapatan.....	12-13
B.2 Belanja.....	13-14

B.2.1	Belanja Pegawai	14-15
B.2.2	Belanja Barang	15-16
B.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16-17
B.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	17-18
B.2.5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18-19
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1	Aset Lancar.....	19
C.1.1	Persediaan.....	19
C.2	Aset Tetap	19
C.2.1	Tanah	19-20
C.2.2	Peralatan dan Mesin	20-21
C.2.3	Gedung dan Bangunan.....	21-22
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.2.5	Aset Tetap Lainnya	22-23
C.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	23
C.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.3	Aset Lainnya	23
C.3.1	Aset Lain-lain	24
C.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	24
C.4	Kewajiban Jangka Pendek.....	24
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga.....	24-25
C.5	Ekuitas.....	25
C.5.1	Ekuitas.....	25
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	26
D.2	Beban Pegawai.....	26-27
D.3	Beban Persediaan	27-28
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	28-29
D.5	Beban Pemeliharaan	29
D.6	Beban Perjalanan Dinas	30
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30-31
D.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	32
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	33

E.1	Ekuitas Awal	33
E.2	Surplus/Defisit-LO	33
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar	33
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	33
E.5	Transaksi Antar Entitas	34
E.6	Ekuitas Akhir	34
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	35
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2	Pengungkapan Lain-lain	35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berita Acara Rekonsiliasi

Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dengan KPKNL

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Bendahara Penerima

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Bendahara Pengeluaran

Pendukung Laporan Keuangan (aplikasi SAIBA)

Pendukung Laporan Keuangan (web e-rekon)

Memo Penyesuaian

Laporan Pembayaran/Penyetoran PNBPN

LPJ Bendaharan Penerimaan

LPJ Bendahara Pengeluaran

Telaah Laporan Keuangan

Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jawa Barat TA. 2016

Hasil Verifikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk HewanTahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 404,336,759 atau mencapai 91.89 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 440,000,000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp 14,676,518,541 atau mencapai 93.76 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 15,653,742,000

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 70,014,684,007 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 6,840,110,260 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 63,174,573,747 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 29,596,859 dan Rp 69,985,087,148

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 324,786,272 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp 16,172,568,661 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp 15,847,782,389. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 476,345,019 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 15,371,437,370.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 71,084,342,736 ditambah Defisit-LO sebesar Rp 15,371,437,370 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 14,272,181,782 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 69,985,087,148.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	440,000,000	404,336,759	91.89	363,722,400
Jumlah Pendapatan		440,000,000	404,336,759	91.89	363,722,400
BELANJA	B.2				
Belanja Barang					
Belanja Pegawai	B.2.1	3,340,566,000	3,233,633,099	96.80	3,168,727,479
Belanja Barang	B.2.2	10,503,737,000	9,987,615,142	95.09	10,584,867,512
Jumlah Belanja Operasional		13,844,303,000	13,221,248,241	95.50	13,753,594,991
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	1,707,119,000	1,353,264,300	79.27	391,560,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	0	0	0	651,081,558
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	102,320,000	102,006,000	99.70	1,410,481,600
Jumlah Belanja Modal		1,809,439,000	1,455,270,300	80.42	2,453,123,158
Jumlah Belanja		15,653,742,000	14,676,518,541	93.75	16,206,718,149

Bogor , Januari 2018
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

II. NERACA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	6,840,110,260	5,581,424,784
Jumlah Aset Lancar		6,840,110,260	5,581,424,784
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	18,692,000,000	18,692,000,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	33,890,878,818	32,680,231,018
Gedung dan Bangunan	C.2.3	32,069,990,778	32,069,990,778
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1,568,285,600	1,466,279,600
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	27,000,000	27,000,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	97,755,800	49,076,500
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	(21,269,168,975)	(18,232,963,043)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	(1,806,097,003)	(1,160,223,667)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	(71,571,271)	(31,668,070)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.7	(24,500,000)	(24,500,000)
Jumlah Aset Tetap		63,174,573,747	65,535,223,116
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	319,656,000	240,178,000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2	(319,656,000)	(239,878,000)
Jumlah Aset Lainnya	C.3.3	0	300,000
Jumlah Aset		0	71,116,947,900
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	29,596,859	32,605,164
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		29,596,859	32,605,164
Jumlah Kewajiban		29,596,859	32,605,164
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	69,985,087,148	71,084,342,736
Jumlah Ekuitas		69,985,087,148	71,084,342,736
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		70,014,684,007	71,116,947,900

Bogor , Januari 2018
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	324,786,272	250,483,785
JUMLAH PENDAPATAN		324,786,272	250,483,785
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3,233,633,099	3,168,727,479
Beban Persediaan	D.3	1,392,771,759	449,851,312
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,587,329,961	3,996,257,292
Beban Pemeliharaan	D.5	2,126,964,734	2,143,837,985
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,009,258,639	1,759,351,263
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3,812,610,469	3,816,337,447
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN		16,172,568,661	15,334,362,808
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(15,847,782,389)	(15.083,879,023)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	5,500,000	3,345,000
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	503,764,130	355,859,226
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	32,919,111	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		476,345,019	355,859,226
SURPLUS/DEFISIT – LO		(15,371,437,370)	(15,450,368,132)

Bogor, Januari 2017
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	71,084,342,736	70,056,390,591
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(15,371,437,370)	(15,450,368,132)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUTANSI/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	0	635,324,528
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.4		
Koreksi Lain-lain	E.3.5		
JUMLAH		0	635,324,528
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14,272,181,782	15,842,995,749
EKUITAS AKHIR	E.5	69,985,087,148	71,084,342,736

Bogor, Januari 2018
Kepala Balai,

drh. Rr. Endang Ekowati
NIP. 196209161994032001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang dibina secara teknis oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/5/ 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. Pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan

- mutu produk hewan;
9. Pelaksanaan kajian resiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
 10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
 11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
 12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
 13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
 14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
 15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.

Rencana Strategis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dibuat pada tahun anggaran 2015 yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019. Rencana strategis BPMSPH ini telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan BPMSPH yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat melalui Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing.

Dalam rangka menentukan arah dan menjalankan peranan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka BPMSPH telah menentukan visi dan misi. Visi merupakan gambaran tentang suatu keadaan ideal yang diinginkan dimasa yang akan datang dan merupakan suatu harapan masa depan BPMSPH. Visi ini merupakan acuan untuk mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan BPMSPH untuk mewujudkan cita-citanya. Adapun visi BPMSPH adalah **“Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu**

produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional”. Misi BPMSPH menggambarkan tugas utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan mandat yang diberikan. Selain itu misi BPMSPH tidak hanya memperhatikan kepentingan BPMSPH sendiri saja, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Misi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang diakreditasi;
2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
3. Melaksanakan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
4. Meningkatkan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
5. Meningkatkan pengembangan teknik dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan jejaring kerja dengan pelanggan dan *Stakeholders*/lembaga terkait.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 4. Anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	440,000,000	440,000,000
Jumlah Pendapatan	440,000,000	440,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,340,566,000	3,340,566,000
Belanja Barang	10,706,055,000	9,606,057,000
Belanja Modal	195,400,000	1,707,119,000
Jumlah Belanja	14,242,021,000	14,653,742,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp 404,336,759*

B. 1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2017 adalah sebesar Rp 218,433,787 atau mencapai 49.64% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 440,000,000.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II T.A. 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	440,000,000	319,951,500	72.71
423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	5,500,000	0.00
423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0,00	72,754,826	0.00
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1,295,661	0.00
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	4,834,772	0.00
Jumlah	440,000,000	404,336,759	91.89

Realisasi Pendapatan TA. 2017 mengalami kenaikan 11.16 % dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPMSPH adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2017 dan 2015

Uraian	Realisasi T.A 2017	Realisasi T.A 2016	%
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	319,951,500	243,444,500	31.42
423291 Pendapatan Jasa Lainnya		2,200,000	(100)
423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5,500,000	3,345,000	64.42
423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	72,754,826	109,893,615	(33.80)
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,295,661		
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,834,772	4,839,285	(0.09)
Jumlah	404,336,759	363,722,400	11.16

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara
Rp
14,676,518,541

Realisasi Belanja BPMSPH pada TA 2017 adalah sebesar Rp 14,676,518,541 atau 93.76 % dari anggaran belanja sebesar Rp 15,653,742,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja instansi TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Pagu	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3,340,566,000	3,233,633,099	96.80
Belanja Barang	10,503,737,000	9,987,615,142	95.09
Belanja Modal	1,809,439,000	1,455,270,300	80.43
Total Belanja Kotor	15,653,742,000	14,684,527,981	93.81
Pengembalian Belanja		(8,009,440)	
Total Belanja	15,653,742,000	14,676,518,541	93.76

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan TA 2017

Uraian Kegiatan	2017		
	Pagu	Realisasi	.%
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	726,000,000	672,024,375	92.57
1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	8,777,218,000	8,071,573,134	92.00
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	6,154,524,000	5,940,930,472	96.53
Total Belanja Kotor	15,653,742,000	14,684,527,981	93.81
Pengembalian Belanja		(8,009,440)	
Total Belanja	15,653,742,000	14,676,518,541	93.76

Komparatif dengan T.A 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 1.53 %. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Alokasi anggaran TA 2017 mengalami penurunan 4.86% dibandingkan dengan alokasi anggaran TA 2016, namun begitu realisasi belanja pegawai secara nominal mengalami peningkatan sebesar 2.04 % ditujukan untuk kegiatan penambahan pegawai serta kenaikan pangkat dan golongan dan renumerasi.
2. Alokasi anggaran belanja tahun 2017 mengalami revisi sebesar (10.24) % dari alokasi anggaran awal, hal tersebut diikuti dengan penurunan belanja barang sebesar 5.62 % dari tahun sebelumnya.
3. Alokasi anggaran belanja modal mengalami penurunan dibanding TA. 2016 sehingga realisasi belanja modal secara nominal mengalami penurunan sebesar 40.67 % dibandingkan tahun sebelumnya,.

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 3,233,633,099

Penyerapan anggaran belanja pegawai di TA. 2017 dan 2016 adalah masing masing sebesar Rp 3,233,633,099 dan Rp. 3,168,727,479. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 5.40% dari TA 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain :

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan renumerasi PNS

Tabel 9. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,340,566,000	3,156,799,479	5.82
Belanja Lembur		11,928,000	
Jumlah Belanja Kotor	3,3340,566,000	3,168,727,479	5.42
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	3,3340,566,000	3,168,727,479	5.42

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 9,987,615,142 dan 10,584,867,512. Berikut rincian Belanja Barang Rp 9,987,615,142 belanja barang TA 2017 dan TA 2016

Tabel 10. Belanja Barang TA. 2017 dan 2016

Uraian	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	888,962,433	1,117,929,440	(20.48)
Belanja Barang Non Operasional	2,021,640,701	2,291,313,805	(11,77)
Belanja Barang Persediaan	2,464,528,050	3,104,945,302	(20.62)
Belanja Jasa	679,735,132	554,887,633	22,50
Belanja Pemeliharaan	1,923,490,187	1,756,918,819	9.4
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,017,268,079	1,744,274,113	15.65
Belanja Perjalanan Luar Negeri		21,497,050	
Jumlah Belanja Kotor	9,995,624,582	10,591,801,612	(5.6)
Pengembalian Belanja Barang	-8,009,440	-6,934,100	15.50
Jumlah Belanja	9,987,615,142	10,584,867,512	(5.64)

Realisasi belanja barang di TA 2017 mengalami penurunan sebesar 5.64 % dibanding TA 2016. Hal ini disebabkan menurunnya belanja barang operasional, non operasional dan persediaan serta dilakukan revisi dalam rangka penghematan di alokasi anggaran sub kelompok

belanja jasa berkisar 39.96%

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

Rp.
1,353,264,300

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016 adalah masing masing sebesar Rp. 1,353,264,300 dan Rp 391,560,000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami peningkatan dengan nominal yang signifikan, hal ini disebabkan adanya fasilitasi peralatan laboratorium dalam rangka penguatan dan peningkatan pelayanan pengujian yang menyerap sekitar 68.14 % dari alokasi anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 245.61% dibandingkan TA 2016.

Belanja modal peralatan dan mesin TA 2017 dialokasikan pada

1. Polymerase Chain Reactor

- Rotor Gene Q 2 Plex Real	Rp. 660,000,000
- Senso Quest)11-101	Rp. 471,680,000
2. 2 PH Meter (alat ukur universal)	Rp. 13,600,000
3. Microcentrifuge	Rp. 7,100,000
4. Loop Sterilizer	Rp. 11,000,000
5. 2 Alat Pendingin	Rp. 34,400,000
6. Mesin Pemotong Rumput	Rp. 5,000,000
7. LCD Proyektor	Rp. 17,325,000
8. 2 PC	Rp. 29,260,000
9. Note Book	Rp. 16,720,000
10. Printer	Rp. 2,750,000

11. 2 unit sepeda motor Rp. 35,750,000
12. mesin penghitung uang Rp. 2,475,200
13. 3 unit mesin penghancur kertas Rp. 3,915,600

Tabel 11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016 Komparatif

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,353,264,300	391,560,000	245,60
Jumlah Belanja Kotor	1,353,264,300	391,560,000	245,60
Pengembalian Belanja		0	0
Jumlah Belanja	1,353,264,300	391,560,000	245,60

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2017

B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 102,006,000

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,410,481,600 dan Rp 0. Dukungan anggaran pada penambahan atas nilai Jaringan terjadi di tahun anggaran 2016

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 dan 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	102,006,000	1,410,481,600	(92,77)
Jumlah Belanja Kotor	102,006,000	1,410,481,600	(92,77)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	102,006,000	1,410,481,600	(92,77)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Persediaan Saldo Persediaan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 6,840,110,260 dan Rp5,581,424,784 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Persediaan TA 2017 dan 2016

Uraian Persediaan	TA 2017	TA 2016
Barang Konsumsi	36,862,833	33,992,958
Bahan untuk Pemeliharaan	68,023,643	100,158,925
Suku Cadang	1,128,800,450	849,771,352
Bahan Baku	5,606,423,334	4,597,501,549
Jumlah	6,840,110,260	5,581,424,784

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Aset Tanah
Rp
18,692,000,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18,692,000,000 dan Rp18,692,000,000.

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah TA 2017

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	8,000 m2	Pemuda No, 29a Rt.01/06, Tanah Sareal	18,692,000,000
Jumlah			18.692,000,000

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Alsin
Rp
33,890,878,818

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPMSPH TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 33,890,878,818 dan Rp 32,680,231,018. Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin tersaji dalam tabel di bawah ini :

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Gedung dan Bangunan Rp32,069,990,778

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32,069,990,778 dan Rp Rp32,069,990,778.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1,568,285,600

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp Rp1,568,285,600 dan Rp 1,466,279,600 . Rincian penambahan nilai aset jaringan dan irigasi disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 16. Tabel Mutasi Penambahan Jaringan Tahun 2017

URAIAN	NILAI (Rp.)
134113 Jaringan	

Tabel 17 Mutasi Penambahan Irigasi Tahun 2017

URAIAN	NILAI (Rp.)
134112 Irigasi	
Mutasi Tambah	

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap
Lainnya
Rp27,000,000

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp27,000,000 dan Rp27,000,000. Tidak ada mutasi tambah pada aset tetap lainnya. Berikut daftar aset tetap yang dimiliki BPMSPH.

Tabel 18. Aset tetap lainnya BPMSPH Tahun 2016

URAIAN	NILAI (Rp.)
135121 Aset Tetap Lainnya	
Monografi (4)	2,500,000
Alat Musik Modern/ Band (1)	24,500,000
Mutasi Tambah	27,000,000

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 97,755,800

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 97,755,800 dan Rp49,076,500 yang merupakan nilai nominal untuk jasa konsultan perencanaan pembangunan asrama Bimtek (PT. Reka Graha Indah Abadi) pada tahun 2015 sebesar Rp49,076,500 dan pekerjaan pengadaan jasa konsultan perencana lift (PT. Elsadai Servo Cons) sebesar Rp. 48,679,300.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 23,171,337,249

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 23,171,337,249 dan Rp 19,449,354,780. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	33,890,878,818	21,269,168,975	12,621,709,843
Gedung dan Bangunan	32,069,990,778	1,806,097,003	30,263,893,775
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,568,285,600	71,571,271	1,496,714,329
Aset Tetap Lainnya	27,000,000	24,500,000	2,500,000
Akumulasi Penyusutan	67,556,155,196	23,171,337,249	44,384,817,947

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 319,656,000 dan Rp 240.178.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPMSPH serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Lain-lain

Rp 319,656,000

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPMSPH per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 319,656,000 dan Rp

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 239,578,000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buk
1.	Aset Lain-lain	319,656,000	(319,656,000)	0
Akumulasi Penyusutan		319,656,000	(319,656,000)	0

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 29,596,859 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 29,596,859 dan Rp 32,605,164. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun

rincian Utang kepada Pihak Ketiga BPMSPH per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

Uraian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Nilai (Rp)
Langganan Air	1,461,200
Langganan Listrik	27,053,530
Langganan Telepon	1,082,129
Jumlah	29,596,859

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Jumlah Ekuitas Rp 69,985,087,148 adalah masing-masing sebesar Rp 69,985,087,148 dan Rp 71,084,342,736 . Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp 324,786,272

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 324,786,272 dan Rp 250,483,785. Rincian pendapatan disajikan dalam tabel 22 berikut ini

Tabel 22. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 20176 dan 2016

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,834,772	4,839,285	(0.09)
423291 Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,200,000	0
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	324,786,272	243,444,500	(33.41)
Jumlah	324,786,272	642,239,451	(49.43)

Pendapatan Jasa berasal dari pengujian produk asal hewan selama tahun 2017.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp

3,233,633,099

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 3,233,633,099 dan Rp 3,168,727,479. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 23 Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2,208,050,100	2,139,941,500	3.18
Beban Pembulatan Gaji PNS	30,039	28,429	5.66
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	147,896,378	142,277,746	3.94
Beban Tunj. Anak PNS	46,268,516	44,757,748	3.37
Beban Tunj. Struktural PNS	37,440,000	37,440,000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	313,000,000	295,435,000	5.94
Beban Tunj. PPh PNS	1,645,246	30,344,276	(94.57)
Beban Tunj. Beras PNS	124,634,820	123,765,780	0.70
Beban Uang Makan PNS	320,353,000	301,034,000	6.41
Beban Tunjangan Umum PNS	34,315,000	41,775,000	(17.85)
Beban Uang Lembur	0	11,928,000	-49.85
Jumlah		3,168,727,479	7.78

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp
1,392,771,759*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1,392,771,759 dan Rp 449,851,312. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	20,658,721	440,879,232	130.25
Beban Persediaan konsumsi	1,372,113,038	8,972,080	211.22
Jumlah	1,392,771,759	449,851,312	341.47

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 3,587,329,961

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 3,587,329,961 dan Rp 3,996,257,292. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik / Turun
Beban Keperluan Perkantoran	447,834,192	695,503,865	35.61
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	193,521,056	187,445,405	3.24
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,902,185	4,320,170	59.76

Beban Honor Operasional satuan Kerja	161,480,000	199,400,000	(19.01)
Beban Barang Operasional Lainnya	79,225,000	21,960,000	260,76
Beban Bahan	647,405,066	756,449,146	(14.41)
Beban Honor Output Kegiatan	626,600,000	65,905,000	850.76
Beban Barang Non Operasional Lainnya	747,635,635	1,468,480,909	(49.08)
Beban Langganan Listrik	358,425,655	479,242,356	(25.20)
Beban Langganan Telepon	11,955,730	17,413,971	(31.34)
Beban Langganan Air	20,678,200	22,383,000	(7.61)
Beban Sewa	48,490,000	0	0
Beban Jasa Profesi	48,790,000	77,753,470	(37.25)
Beban Jasa Lainnya	188,387,242	0	0
Jumlah	3,587,329,961	3,996,257,292	(10.23)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp 2,143,837,985

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2,143,837,985 dan Rp1,615,587,288. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	548,953,408	339,665,660	61.61
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239,147,084	267,382,896	(10.56)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,135,389,695	1,149,870,263	(1.25)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	57,675,854	38,556,384	49.58
Beban Persediaan suku cadang	145,798,693	348,362,782	(58.14)
Jumlah	2,126,964,734	2,143,837,985	(0.78)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
2,009,258,639*

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 2,009,258,639 dan Rp1,759,351,263. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1,807,455,864	1.559,022,593	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,965,000	10,940,000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,775,000	10,440,000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	188,062,775	157,451,620	
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	21,497,050	
Jumlah		1,759,351,263	

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 3,816,337,447

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3,816,337,447 dan Rp2,539,797,459. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	645,843,336	639,916,469	0.92
Beban Penyusutan Irigasi	108,776	108,213	0.52
Beban Penyusutan Jaringan	39,794,425	20,428,215	94.80
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	300,000	300,000	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,136,533,392	3,155,584,580	(0.60)
Jumlah	3,816,337,447	3,816,337,447	0.15

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0.

D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (Rp. 366,489,109) Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016	% Naik/(Turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5,500,000	3,345,000	64.42
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	626,047,638	
Jumlah Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	5,500,000	(622,702,638)	(100.88)
Pendapatan dari kegiatan non operasional	503,764,130	355,859,226	41.56
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	32,919,111	99,645,697	(66.96)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Jumlah surplus dari kegiatan non operasional lainnya	470,345,019	256,213,529	83.57
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	476,345,019	(366,489,109)	(229.97)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 71,084,342,736 dan Rp. 70,056,390,591.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 15,371,437,370 dan Rp 15,450,368,132. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 635,324,526. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.3.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. 14,272,181,782 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar p. 14,272,181,782 dan Rp15,842,995,749.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 30. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,676,518,541
Diterima dari Entitas Lain	(404,336,759)
Jumlah	14,272,181,782

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp

69,985,087,148

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 69,985,087,148 dan Rp 71,084,342,736.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Catatan Hasil Reviuw (CHR) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tanggal 9 Januari 2018 pada terdapat Kesalahan Penganggaran dan Pencatatan Aset Tetap Dalam Akun Persediaan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan minimal senilai Rp. 3,915,600. Hasil reviu sudah ditindaklanjuti dan telah dilakukan perbaikan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-

